

RINGKASAN EKSEKUTIF

2025

**Eksplorasi Praktik
Collaborative Governance
dalam Penyelenggaraan
Pendidikan Gratis dan
Inklusif
(Studi Kasus: SMA/SMK dan
SLB Tingkat Menengah Atas
Swasta di Provinsi Riau)**

Dr. Mustiqowati Ummul Fithriyyah, M.Si
Dr. Yenni Kurniawati, S.Si., M.Si
Monalisa, S.Sos., M.PA
Rama Yoedha Satria, S.T., M.T
Monalisa Hasibuan, SSi, M.Si

(Ketua)
(Anggota)
(Anggota)
(Anggota)
(Anggota)



RINGKASAN EKSEKUTIF

Partisipasi pendidikan pada jenjang SMA/SMK/SLB di Provinsi Riau masih berada pada tingkat kritis. Hanya 64,81% remaja berusia sekolah menempuh pendidikan menengah, dan dari 565.273 penduduk usia 15–19 tahun, hanya 172.295 yang bersekolah di SMA/SMK/SLB (BPS 2024; Dikdasmen 2023).

Kondisi ini diperburuk oleh tingginya biaya pendidikan, ketimpangan fasilitas sekolah, rasio guru siswa yang tidak seimbang, serta lemahnya implementasi pendidikan inklusif.

Penelitian BRIDA melibatkan 534 responden survei dan 72 informan kunci, serta menganalisis data melalui *Importance Performance Analysis* (IPA) dan *System Dynamics*. Temuan menunjukkan bahwa program pendidikan gratis swasta masih sangat bergantung pada subsidi silang, bantuan donatur tidak tetap, dan CSR, yang semuanya tidak memiliki keberlanjutan.

Model *Collaborative Governance* (Emerson et al., 2012) menjadi kerangka yang paling relevan untuk menjawab masalah klasik ini. Model ini mengintegrasikan pendekatan kolaboratif multi-aktor: pemerintah, legislatif, sekolah/yayasan, dunia usaha, masyarakat sipil, akademisi, dan media.

Pendahuluan

Pendidikan gratis di Provinsi Riau masih menghadapi tantangan serius, terutama pada jenjang SMA/SMK. Meskipun pendidikan dasar telah dijamin secara gratis, akses pendidikan menengah tetap lemah. Data menunjukkan penurunan signifikan tingkat partisipasi dari SD (98,13%) ke SMA (64,81%), sementara jumlah penduduk usia 15–19 tahun mencapai 565.273 orang, tetapi siswa SMA/SMK hanya 172.295, mengindikasikan tingginya angka putus sekolah. Keterbatasan fasilitas semakin memperburuk ketimpangan tersebut. Studi internasional menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan gratis sering tidak efektif ketika tidak diiringi syarat dan mekanisme pemerataan, serta dipengaruhi faktor nonfinansial seperti kurangnya motivasi dan akses informasi. Di Indonesia, berbagai model pembiayaan seperti subsidi silang, beasiswa, dan CSR telah diterapkan, namun masih terkendala minimnya donor dan distribusi pendanaan. Karena itu, diperlukan model baru berbasis *Collaborative Governance* yang mengintegrasikan aktor-aktor kunci melalui keterlibatan prinsip, kapasitas aksi bersama, dan motivasi kolektif untuk mewujudkan pendidikan gratis berkelanjutan di SMA/SMK/SLB swasta di Riau.

Masalah Utama

1. Partisipasi Sekolah yang Rendah

Banyak anak usia sekolah menengah atas di Provinsi Riau yang tidak dapat mengakses pendidikan akibat keterbatasan ekonomi dan kurangnya sekolah yang terjangkau. Mayoritas siswa (58%) menyatakan biaya SPP dan pembelian alat sekolah sebagai beban paling berat.

2. Keterbatasan Sarana dan Prasarana

Banyak sekolah swasta yang belum memiliki fasilitas pembelajaran yang memadai untuk mendukung pendidikan yang inklusif.

3. Distribusi Guru yang Tidak Merata

Ketidakseimbangan dalam distribusi guru membuat beberapa sekolah kekurangan tenaga pengajar, yang mempengaruhi kualitas pendidikan.

4. Kurikulum yang Tidak Memadai untuk Pendidikan Inklusif

Kurikulum di banyak sekolah belum sepenuhnya mendukung pendidikan inklusif, yang seharusnya memberi kesempatan belajar yang setara bagi semua siswa, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus.

Tujuan Riset

1. Menghitung jumlah sekolah menengah atas swasta sesuai kategori akreditasi dan jumlah peserta didik pada sekolah menengah atas swasta di Provinsi Riau.
2. Menghitung komponen pembiayaan untuk pelaksanaan pendidikan gratis pada sekolah menengah atas swasta di Provinsi Riau
3. Menghitung jumlah biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pendidikan gratis pada sekolah menengah atas swasta di Provinsi Riau.
4. Menyediakan model pelaksanaan pendidikan gratis untuk usia pendidikan menengah atas swasta di Provinsi Riau yang sesuai dan efektif diimplementasikan di Provinsi Riau.

Hasil Analisis

1. Hasil *Importance Performance Analysis* (IPA)

Importance Performance Analysis (IPA) digunakan untuk mengukur tingkat kepentingan dan kinerja berbagai atribut dalam penyelenggaraan pendidikan gratis inklusif. Hasil analisis

IPA mengelompokkan atribut-atribut ini ke dalam empat kuadran berdasarkan tingkat kepentingan dan kinerja.

1. **Kuadran I (Penting tapi Belum Baik):** Atribut yang memiliki tingkat kepentingan tinggi namun kinerja rendah, seperti "Aksesibilitas Pendidikan" dan "Kemampuan Ekonomi & Pembiayaan". Ini adalah area yang membutuhkan perhatian dan perbaikan segera.
2. **Kuadran II (Tidak Terlalu Penting dan Belum Baik):** Atribut dengan kepentingan sedang namun kinerja rendah, seperti "Kelengkapan Fasilitas Pembelajaran" yang memerlukan perhatian untuk meningkatkan fasilitas dasar.
3. **Kuadran III (Tidak Penting tapi Sudah Baik):** Atribut dengan kepentingan rendah namun kinerja tinggi, seperti "Dukungan Sosial & Bantuan Pendidikan", yang sudah berfungsi dengan baik tetapi tidak terlalu mendesak untuk ditingkatkan.
4. **Kuadran IV (Penting dan Sudah Baik):** Atribut yang sudah memiliki kinerja tinggi dan tingkat kepentingan yang tinggi, seperti "Kinerja dan Prestasi Akademik Siswa". Area ini perlu dipertahankan karena telah memberikan kepuasan yang tinggi.

Tabel 1. Rekapitulasi Sekolah Menengah (SMA, SMK, dan SLB) yang masuk Kuadran I dan IV

Komponen Pembiayaan	Kuadran I (Akreditasi B, C dan tanpa keterangan)	Kuadran IV (Akreditasi A)	Kuadran II dan III
Biaya spp sekolah per bulan	Rp 227,187.50	Rp 648,157.89	Tidak ada sekolah yang masuk ke kuadran
Biaya uang gedung	Rp 32,003.97	Rp 618,518.52	Tidak ada sekolah yang masuk ke kuadran
Biaya uang masuk	Rp 176,562.50	Rp 559,649.12	Tidak ada sekolah yang masuk ke kuadran
Biaya uang seragam	Rp195,416.67	Rp360,980.39	Tidak ada sekolah yang masuk ke kuadran
Biaya Lainnya (Praktik, Ujian, PKL, OSIS, Ektrakurikuler, dan lainnya)	Rp 74,479.17	Rp 302,631.58	Tidak ada sekolah yang masuk ke kuadran
Total	Rp 705,649.80	Rp 2,489,937.51	Rp -

2. Model Biaya Pendidikan Gratis

Berdasarkan hasil riset, biaya pendidikan gratis untuk SMA, SMK, dan SLB di Provinsi Riau dihitung dengan mempertimbangkan komponen biaya utama, seperti biaya operasional sekolah, biaya pendidikan guru, fasilitas pembelajaran, dan pembiayaan program inklusi. Untuk menjalankan pendidikan gratis yang inklusif, biaya pendidikan per siswa dihitung sebagai berikut:

Tabel 2. Rekapitulasi Biaya Pendidikan Siswa setiap Bulan, Tahun dan Biaya Bantuan Pendidikan

Jenis Sekolah	Biaya Pendidikan Setiap Bulan (Per-Siswa)	Biaya Pendidikan dalam Satu Tahun (Per-Siswa)	Biaya Bantuan Pendidikan dalam Satu Tahun
SMA Swasta	Rp 479,351	Rp 4,348,518.52	Rp 758,381,629.63
SMK Swasta	Rp 489,750	Rp 2,999,000.00	Rp 443,852,000.00
SLB Swasta	Rp 252,083	Rp 2,008,333.33	Rp 30,928,333.33

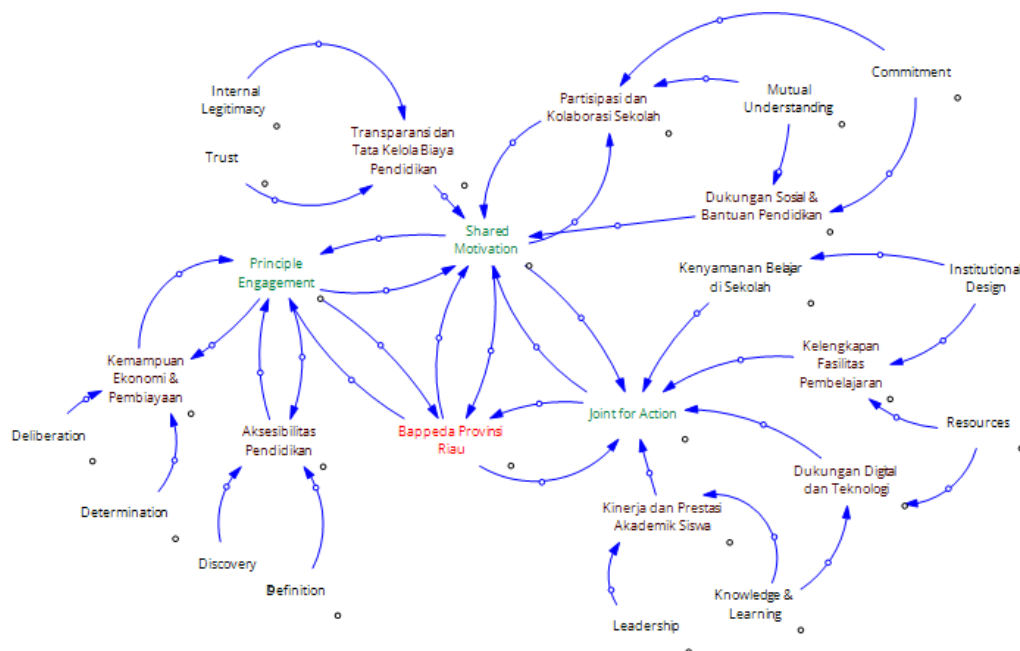
Tabel 3. Rekapitulasi Biaya Bantuan Pendidikan siswa SMA, SMK, dan SLB untuk 3 Wilayah cabang Pendidikan dalam satu tahun

Jenis Sekolah	Jumlah Siswa	Biaya Pendidikan dalam Satu Tahun (Per-Siswa)	Biaya Bantuan Pendidikan dalam Satu Tahun
SMA Swasta	22.192	Rp 4,348,518.52	Rp. 96,502,322,962.96
SMK Swasta	33.947	Rp 2,999,000.00	Rp.101,807,053,000.00
SLB Swasta	4.914	Rp 2,008,333.33	Rp. 9,868,950,000.00
Total	61.053	Rp 9,355,851.85	Rp.208,178,325,962.96

2. Model Sistem Dinamis (System Dynamics)

Pendekatan berbasis sistem dinamis dan *Collaborative Governance* menawarkan solusi yang efektif untuk mengatasi tantangan dalam penyelenggaraan pendidikan gratis dan inklusif di Provinsi Riau. Dengan mengintegrasikan berbagai dimensi seperti Aksesibilitas Pendidikan, Kemampuan Ekonomi & Pembiayaan, Transparansi, serta Dukungan Sosial, pendekatan ini menciptakan interaksi yang sinergis antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Keterlibatan semua aktor dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan memastikan bahwa pendidikan dapat diakses oleh semua kalangan, terutama siswa dari keluarga miskin, dengan kualitas yang memadai.

Melalui *Causal Loop Diagram* (CLD), hubungan sebab-akibat antara elemen-elemen yang berbeda dalam sistem pendidikan dapat dipetakan, memberikan wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana peningkatan pendanaan, transparansi, dan partisipasi masyarakat dapat saling mendukung untuk memperkuat kualitas layanan pendidikan. Dengan memperhatikan desain institusional yang tepat, alokasi sumber daya yang efisien, serta peningkatan fasilitas dan dukungan teknologi, sistem pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan dapat tercapai. Pendekatan ini juga menekankan pentingnya kolaborasi antara sektor publik dan swasta, serta peningkatan transparansi dalam pengelolaan dana pendidikan, yang pada gilirannya akan membangun kepercayaan di antara semua pihak terkait. Dengan demikian, pendidikan yang berkualitas, setara, dan inklusif dapat diwujudkan, menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing untuk masa depan Provinsi Riau.



Gambar 4.13 CLD Sistem Dinamis Berdasarkan *Collaborative Governance*

3. Analisis Kebijakan

Kebijakan terkait pendidikan gratis dan inklusif di Provinsi Riau memerlukan pendekatan yang komprehensif dan melibatkan berbagai pihak. Salah satu kebijakan yang diusulkan adalah Skema Pendanaan Pendidikan Gratis Kolaboratif Non-APBD, yang bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada anggaran daerah dan memperluas sumber pendanaan dari sektor non-APBD, seperti CSR perusahaan dan lembaga zakat. Ini akan memungkinkan lebih banyak siswa dari keluarga miskin untuk mengakses pendidikan tanpa terbebani biaya, serta

menciptakan keberlanjutan pendanaan yang lebih terjamin. Namun, untuk keberhasilan kebijakan ini, diperlukan koordinasi yang efektif antara sektor pemerintah dan non-pemerintah, serta sistem pengelolaan dana yang transparan dan tepat sasaran.

Selain itu, sinkronisasi CSR dengan prioritas daerah juga menjadi langkah penting dalam memastikan bahwa kontribusi perusahaan diarahkan untuk mendukung program pendidikan, terutama di sekolah swasta yang sering kali kekurangan dana. Dengan menetapkan bahwa minimal 20%-30% dari dana CSR perusahaan dialokasikan untuk pendidikan, maka pendidikan di daerah tersebut dapat berkembang dengan lebih merata. Keberhasilan kebijakan ini akan bergantung pada kemampuan pemerintah untuk menyusun pedoman yang jelas tentang bagaimana CSR dapat disalurkan dan dipertanggungjawabkan, serta bagaimana perusahaan dapat mengukur dampak kontribusinya terhadap pendidikan.

Dalam hal ini, Surat Edaran Gubernur yang mendorong perusahaan swasta dan BUMN di wilayah Riau untuk berkomitmen mendukung pendidikan juga menjadi langkah yang strategis. Surat edaran ini akan membantu memperkuat kolaborasi antara sektor swasta dan pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan, dengan menitikberatkan pada berbagai bentuk kontribusi seperti beasiswa, fasilitas pendidikan, dan pelatihan untuk guru. Namun, untuk menjamin efektivitasnya, perlu ada sistem evaluasi yang memastikan bahwa kontribusi yang diberikan benar-benar memberikan dampak positif terhadap akses dan kualitas pendidikan di daerah tersebut.

Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemprov Riau, dunia usaha, dan Dinas Pendidikan dapat menjadi wadah bagi kolaborasi yang lebih terstruktur dan terorganisir dalam pengelolaan CSR pendidikan. MoU ini akan memperkuat komitmen semua pihak dalam memastikan bahwa pendanaan pendidikan tidak hanya mengalir, tetapi juga digunakan dengan cara yang strategis dan sesuai dengan kebutuhan daerah. Hal ini membutuhkan adanya sinergi antara perusahaan besar dan pemerintah daerah untuk menciptakan kebijakan yang dapat mengoptimalkan dampak dari kontribusi CSR terhadap pendidikan.

Pendirian Pusat Kolaborasi Pendidikan (*CollabEdu Center*) menjadi langkah penting selanjutnya. Pusat ini akan berfungsi sebagai penghubung antara sekolah swasta dan mitra pendanaan dari sektor non-pemerintah, sehingga memungkinkan kolaborasi yang lebih terarah dan memfasilitasi penyebaran dana yang tepat guna. Selain itu, pusat ini juga akan menyediakan platform bagi pemangku kepentingan untuk berbagi informasi dan sumber daya, dengan tujuan bersama untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Provinsi Riau. Tantangan terbesar adalah memastikan bahwa pusat ini dapat berfungsi secara efektif dan memenuhi kebutuhan semua pihak yang terlibat dalam proses pendidikan.

Integrasi program CSR pendidikan ke dalam RPJMD/RKPD akan memperkuat perencanaan dan pengalokasian anggaran yang lebih terstruktur dan transparan untuk sektor pendidikan. Dengan memasukkan pendidikan sebagai prioritas dalam perencanaan pembangunan daerah, Pemprov Riau dapat memastikan bahwa dana yang dialokasikan untuk pendidikan mencakup kebutuhan yang ada, terutama di sekolah-sekolah swasta yang sering kali terabaikan dalam hal fasilitas dan pendanaan. Hal ini juga akan memastikan adanya pemerataan dalam kualitas pendidikan antara sekolah negeri dan swasta di daerah tersebut.

Pengembangan sistem dashboard transparansi untuk memantau penggunaan dana pendidikan secara real-time juga merupakan langkah yang sangat penting. Dengan adanya sistem ini, pemangku kepentingan dapat secara langsung mengakses informasi mengenai bagaimana dana pendidikan digunakan, yang pada gilirannya akan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana pendidikan. Namun, implementasi sistem ini membutuhkan infrastruktur digital yang memadai dan kesiapan dari semua pihak untuk beradaptasi dengan teknologi baru.

Pengawasan terhadap penggunaan dana CSR pendidikan juga menjadi aspek krusial. Tanpa pengawasan yang tepat, dana yang disalurkan melalui program CSR bisa jadi tidak digunakan dengan efisien atau bahkan disalahgunakan. Oleh karena itu, penting untuk membangun sistem pengawasan yang memastikan bahwa setiap dana yang diberikan benar-benar digunakan untuk tujuan yang sesuai dan memberikan dampak yang positif. Sistem pelaporan yang rutin dan audit yang transparan akan memperkuat tata kelola pendidikan dan memastikan akuntabilitas dalam penggunaan dana tersebut.

Penyediaan subsidi pendidikan untuk siswa miskin juga menjadi kebijakan yang sangat dibutuhkan. Dengan adanya subsidi pendidikan yang tepat sasaran, siswa dari keluarga tidak mampu akan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk melanjutkan pendidikan mereka tanpa harus memikirkan biaya. Keberhasilan kebijakan ini sangat tergantung pada akurasi data penerima subsidi dan sistem seleksi yang adil, untuk memastikan bahwa bantuan tepat sasaran dan mencakup seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan.

Selain itu, peningkatan program beasiswa internal dan dukungan sosial juga akan memberikan manfaat yang besar bagi siswa yang berprestasi maupun yang berasal dari keluarga kurang mampu. Beasiswa yang lebih luas dan mudah diakses akan membuka lebih banyak peluang bagi siswa untuk melanjutkan pendidikan, sementara dukungan sosial dari alumni dan orang tua asuh akan memastikan keberlanjutan program beasiswa ini. Keberhasilan kebijakan ini bergantung pada penguatan peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam mendukung siswa melalui program beasiswa.

Penguatan kolaborasi dengan dunia usaha dan industri, terutama untuk sekolah-sekolah kejuruan seperti SMK, sangat penting dalam memastikan bahwa siswa mendapatkan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Kolaborasi ini akan memastikan bahwa program magang dan pelatihan di dunia industri dapat diakses oleh lebih banyak siswa, sehingga mereka lebih siap menghadapi dunia kerja setelah lulus. Keberhasilan kebijakan ini akan bergantung pada komitmen perusahaan untuk menyediakan peluang magang dan pelatihan yang berkualitas, serta pada kesiapan sekolah dalam menyusun kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan industri.

4. Strategi dan Rekomendasi Kebijakan

1. Skema Pendanaan Pendidikan Gratis Kolaboratif Non-APBD

Pemprov Riau melalui Dinas Pendidikan perlu menetapkan Peraturan Gubernur atau Pergub tentang "Skema Pendanaan Pendidikan Gratis Kolaboratif Non-APBD untuk SMA/SMK/SLB Swasta". Kebijakan ini bertujuan untuk memperluas akses pendidikan di sekolah-sekolah swasta dengan mengalihkan sebagian pendanaan dari sektor non-APBD, termasuk CSR perusahaan dan lembaga zakat. Ini sejalan dengan prinsip Aksesibilitas Pendidikan yang memastikan lebih banyak siswa miskin dapat mengakses pendidikan tanpa terkendala biaya, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung pendidikan.

2. Sinkronisasi CSR dengan Prioritas Daerah

Dalam mendukung pendidikan inklusif, penting bagi perusahaan yang beroperasi di Riau untuk menyelaraskan rencana *Corporate Social Responsibility* (CSR) mereka dengan program pembangunan daerah, khususnya di sektor pendidikan. Kebijakan ini mengatur agar minimal 20%–30% dari dana CSR perusahaan diarahkan untuk pendidikan, yang memungkinkan lebih banyak kontribusi untuk pendidikan gratis dan memperluas Partisipasi Masyarakat dalam program-program pendidikan inklusif.

3. Surat Edaran Gubernur Riau tentang Komitmen CSR Pendidikan

Melalui Surat Edaran Gubernur, Pemprov Riau dapat mendorong perusahaan swasta dan BUMN di wilayah Riau untuk berkomitmen dalam mendukung pendidikan, baik melalui beasiswa, sarana pendidikan, atau pelatihan bagi guru. Ini bertujuan untuk memperkuat Partisipasi dan Kolaborasi Sekolah serta mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam penyediaan pendidikan yang lebih inklusif.

4. Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemprov Riau, Dunia Usaha, dan Dinas Pendidikan

Penandatanganan MoU antara Pemprov Riau dan berbagai perusahaan besar, seperti RAPP, Pertamina Hulu Rokan, BRK Syariah, PLN, Indah Kiat, dan lainnya, akan menciptakan sinergi yang lebih kuat dalam pengelolaan CSR pendidikan. Skema kerjasama yang terarah ini akan memberikan Dukungan Sosial & Bantuan Pendidikan melalui program-program yang lebih terorganisir, mendukung kelancaran implementasi pendidikan gratis dan mendukung Kualitas Layanan Pendidikan.

5. Apresiasi bagi Perusahaan yang Aktif dalam CSR Pendidikan

Memberikan penghargaan seperti "*Riau Education Partnership Award*" dan pengakuan melalui Laporan Pembangunan Daerah atau Riau CSR Index akan mendorong lebih banyak perusahaan untuk berkontribusi dalam sektor pendidikan. Pemberian apresiasi ini akan memperkuat komitmen perusahaan untuk terus berpartisipasi dalam Program Beasiswa yang merata dan memastikan keberlanjutan pendanaan pendidikan.

6. Pusat Kolaborasi Pendidikan (*CollabEdu Center*)

Pembangunan Pusat Kolaborasi Pendidikan yang akan menjadi penghubung antara sekolah swasta dan mitra pendanaan non-pemerintah akan memperkuat Kinerja dan Prestasi Akademik Siswa. Pusat ini dapat berfungsi sebagai pusat koordinasi untuk mencocokkan kebutuhan pendidikan dengan kontribusi dari sektor non-pemerintah, seperti CSR, lembaga zakat, dan donor pendidikan lainnya.

7. Integrasi CSR Pendidikan ke dalam RPJMD/RKPD

Mengintegrasikan program CSR pendidikan ke dalam RPJMD/RKPD akan menjamin bahwa pendidikan menjadi bagian penting dalam pembangunan daerah. Ini akan memperkuat pengelolaan Kemampuan Ekonomi & Pembiayaan yang lebih terencana dan dapat memastikan dana yang cukup dialokasikan untuk mendukung sekolah swasta, serta mengurangi ketimpangan antara sekolah negeri dan swasta dalam hal fasilitas dan kualitas pendidikan.

8. Laporan Kontribusi CSR/Filantropi Pendidikan

Memastikan bahwa perusahaan dan lembaga zakat diwajibkan melaporkan kontribusi CSR atau filantropi pendidikan secara periodik akan meningkatkan Transparansi dan Tata Kelola Biaya Pendidikan. Hal ini akan memudahkan pemantauan dan pengelolaan dana pendidikan secara transparan, sekaligus memperkuat akuntabilitas publik.

9. Mendorong Transparansi Data Sekolah Swasta

Dengan mempublikasikan data tentang kebutuhan sekolah swasta, rasio guru-siswa,

serta fasilitas yang ada, diharapkan dapat mempermudah aksesibilitas bagi pihak filantropi dan CSR untuk mengetahui kebutuhan spesifik dari masing-masing sekolah. Ini akan memperkuat Kelengkapan Fasilitas Pembelajaran dan memastikan bahwa dukungan dana lebih terfokus pada sekolah yang paling membutuhkan.

10. *Dashboard* Transparansi Pendidikan Gratis Riau

BRIDA dan Dinas Pendidikan dapat mengembangkan sistem *Dashboard* Transparansi yang memungkinkan publik dan pihak terkait untuk memantau penggunaan dana pendidikan gratis secara real-time. Ini akan memperkuat Transparansi Pengelolaan Dana dan memastikan bahwa setiap aliran dana dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.

11. Pengawasan dan Akuntabilitas Publik terhadap CSR

Pendidikan Memastikan akuntabilitas CSR pendidikan melalui laporan yang rutin akan memperkuat Transparansi dan Tata Kelola Biaya Pendidikan. Pengawasan terhadap penggunaan dana ini juga akan menjamin bahwa kontribusi dari perusahaan dan lembaga zakat digunakan dengan tepat sasaran untuk mendukung pendidikan yang inklusif dan berkualitas.

Penutup

Masalah rendahnya partisipasi pada SMA/SMK/SLB di Provinsi Riau tidak dapat diselesaikan oleh satu aktor saja. Pendidikan gratis yang inklusif membutuhkan pendekatan kolaborasi lintas-sektor berbasis kepercayaan, komitmen, dan kapasitas bersama. Model *Collaborative Governance* mampu menyediakan kerangka yang kuat untuk mewujudkan pendanaan berkelanjutan, tata kelola yang transparan, serta pendidikan inklusif yang memberikan akses seluas-luasnya bagi seluruh anak Riau.

Tujuan utama dari kebijakan pendidikan yang diusulkan adalah untuk meningkatkan partisipasi pendidikan menengah secara signifikan, terutama di kalangan siswa yang sebelumnya terbatas oleh hambatan finansial. Dengan memperkuat kualitas layanan pendidikan di sekolah swasta, diharapkan dapat tercipta lingkungan belajar yang setara dengan sekolah negeri, memberikan kesempatan yang lebih luas bagi siswa dari berbagai latar belakang. Kebijakan ini juga bertujuan untuk mengurangi beban finansial keluarga miskin, yang sering kali menjadi penghalang utama bagi anak-anak untuk melanjutkan pendidikan mereka. Melalui penyediaan dana pendidikan yang lebih mudah diakses dan lebih inklusif, sekolah-sekolah swasta akan dapat memberikan fasilitas dan pendidikan yang lebih

baik, tanpa membebani orang tua dengan biaya yang tinggi. Selain itu, kebijakan ini akan mendukung terciptanya sumber daya manusia Riau yang unggul dan berdaya saing, siap menghadapi tantangan global dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperoleh dari pendidikan berkualitas. Dengan memperbaiki akses dan kualitas pendidikan, Riau akan memiliki generasi muda yang lebih kompeten, yang mampu berkontribusi secara positif terhadap kemajuan daerah dan negara.

Semakin jelas bahwa pendidikan gratis yang inklusif tidak semata-mata soal pembebasan biaya, tetapi menyangkut keadilan sosial, kolaborasi multi-aktor, pembiayaan berkelanjutan, dan tata kelola yang kuat. Pendekatan *Collaborative Governance* menawarkan kerangka pemecahan yang holistik dan komprehensif untuk memperbaiki akses dan mutu pendidikan menengah di Provinsi Riau.